

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi satu aspek yang belum terwujud dengan baik bagi masyarakat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh wilayah-wilayah di Indonesia salah satunya Kota Semarang yang memiliki fokus pada perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui program “GERBANG HEBAT” yang menjadi program prioritas bagi Kota Semarang. Program “GERBANG HEBAT” merupakan kependekan dari “Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, dan Etos Bersama Masyarakat), program ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 sebagai bentuk komitmen atas upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang serta menjadi program prioritas yang dicantumkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang tahun 2021-2026 untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat.

Program GERBANG HEBAT memiliki harapan pengentasan kemiskinan minimal 1,5% per tahun yang disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang tahun 2021-2026. Target utama penurunan angka kemiskinan Kota Semarang mengarah kepada desa-desa dengan mayoritas penghuni masyarakat miskin sebagai lokasi pelaksanaan program pada tahun-tahun awal.

Implementasi program GERBANG HEBAT diwujudkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu Kampung Tematik, program *E-warong* Kelompok Bisnis Bersama (KUBE), dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) (Rahmawati A & Nugroho H, 2021: 61). Kampung Tematik dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Peraturan tersebut dibuat dengan mengacu pada Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112).

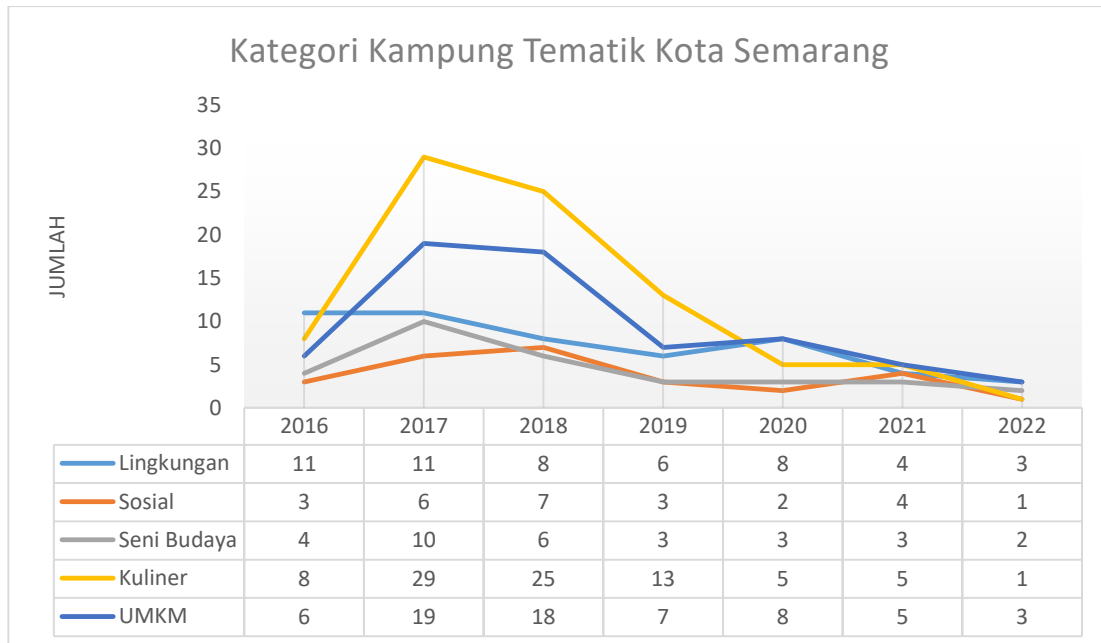
Kampung Tematik menjadi salah satu inovasi unggulan Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada usaha peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal bagi warga miskin dan prasarana dasar permukiman. Program Kampung Tematik melibatkan peran serta partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk membangun *trademark* atau karakteristik lingkungan yang diwujudkan melalui peningkatan atau pengembangan potensi lokal yang ada di wilayah pelaksanaan Kampung Tematik. Pelaksanaan

program Kampung Tematik tentunya tidak terlepas dari dukungan dari pihak pemerintah serta *stakeholder* terkait serta *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang terdiri dari berbagai pihak seperti swasta, perbankan, BUMN/BUMD yang membantu baik dalam bidang infrastruktur dan bidang lainnya.

Kampung Tematik dikategorikan ke dalam pembangunan masyarakat di bidang pariwisata mengingat bahwa pembangunan tidak hanya memfokuskan kepada bidang infrastruktur saja. Pembangunan pariwisata di Kota Semarang menjadi program utama dalam rangkaian pembangunan daerah yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang memfokuskan kepada dua aspek pembangunan, yaitu selain pembangunan infrastruktur juga dilakukan pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan di bidang pariwisata, yaitu program Kampung Tematik (Syarifa N. H & Wijaya A, 2019: 516). Kampung Tematik diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang untuk dapat membangun destinasi wisata baru berbasis kearifan lokal dengan membawa potensi, ciri khas, atau ikon suatu daerah khususnya desa atau kampung yang ada di Kota Semarang melalui pemberdayaan yang bertujuan akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bersumber dari website resmi kampungtematik.semarangkota.go.id (*Data Kampung Tematik*, n.d.) dapat diamati perkembangan jumlah Kampung Tematik sejak tahun 2016-2022 melalui tabel sebagai berikut:

Grafik 1. 1 Jumlah Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2016-2022

berdasarkan *Website* kampungtematik.semarangkota.go.id



Sumber: Analisis Peneliti

260 (dua ratus enam puluh) Kampung Tematik tersebut terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang hingga terdapat 10 (sepuluh) Kampung Tematik Unggulan yang dilansir dari *website* resmi Kampung Tematik Kota Semarang, di antaranya terdapat Kampung Batik Rejomulyo, Kampung Ijo, Kampung Jajan Pasar Gajahmungkur. Kampung Sego (Segala Olahan) Angkringan, Kampung Alam Malon, Kampung Bakul Gilo-Gilo Gabahan Semarang Tengah, Kampung Tematik Bonsai, Kampung Tematik Konveksi, Kampung Petis dan Mangut Tambakharjo, dan Kampung Tematik Misoa (Mie, Soto, Ayam) (Kampung Tematik Unggulan Kota Semarang,

n.d.). Namun kesepuluh Kampung Tematik Unggulan Kota Semarang tersebut bukanlah fokus di dalam penelitian ini, melainkan Kampung Jawi yang tidak tercantum ke dalam Kampung Tematik unggulan. Kampung Jawi menarik perhatian peneliti karena berhasil meraih penghargaan juara pertama kategori wisata kuliner pada *Trisakti Tourism Award 2021* padahal Kampung Jawi tidak termasuk ke dalam 10 Kampung Tematik Unggulan Kota Semarang. Kampung Jawi terletak di RW 1, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Kampung Jawi sebagai salah satu Kampung Tematik rintisan bertemakan kebudayaan Jawa diresmikan pada awal tahun 2017. Perwujudan tema Kampung Jawi terlihat dari berbagai potensi wisata berasaskan kebudayaan Jawa seperti pagelaran ketoprak, kelompok gamelan, kuliner tradisional Jawa yang dapat ditemukan di Pasar Jaten, hingga Upacara Memetri sebagai tradisi syukuran masyarakat Kampung Jawi yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Oktober.

Berdasarkan pandangan Steiner tentang partisipasi masyarakat maka pembangunan Kampung Tematik di Kota Semarang diharapkan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up* untuk mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan dari rakyat di daerah tersebut (Steiner A & Space J. F, 2018: 18). Akan tetapi pelaksanaan pembangunan Kampung Tematik yang terjadi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Di dalam Pasal 7 Bab IV Peraturan Walikota Semarang Nomor 22

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang melakukan tugas-tugas seperti:

- a. Pemetaan potensi dan permasalahan;
- b. Penentuan tema;
- c. Penentuan dan penyusunan proposal Kampung Tematik,
- d. Verifikasi proposal Kampung Tematik.

Edaran pembangunan Kampung Tematik kemudian diserahkan melalui Kelurahan untuk disampaikan di dalam rapat bersama dengan perwakilan masyarakat. Target pencanangan Kampung Tematik di Semarang berjumlah 177 kelurahan pada tahun 2018, jadi setiap kelurahan harus ada satu kampung tematik (Nuri R, 2019: 2). Kampung Tematik seakan menjadi program “kejar target” pemerintah yang memaksa masyarakat untuk mengajukan tema Kampung Tematik sehingga fenomena yang terjadi di lapangan lebih menunjukkan pembangunan yang bersifat *top down*.

Dampak dari instruksi pemerintah yang cenderung memaksa daerah yang ditunjuk untuk mengembangkan Kampung Tematik terlihat di dalam proses pembangunan khususnya pada tahap perencanaan Kampung Jawi. Dampak tersebut muncul pada aspek partisipasi masyarakat yang sulit untuk melibatkan diri di dalam proses pembangunan Kampung Jawi karena diduga program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dugaan tersebut diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngabiyatmo, Martien Herna Susanti, dan Setiajid dalam

penelitiannya yang berjudul “*Empowering and Developing the Local Potency Through Thematic Village in Semarang*” yang menyimpulkan bahwa:

“It has been analyzed that several factors hinder thematic villages to sustain their identity. First, the planning concept of the Thematic Village is weak because of the inconsistency of the program with the social, economic and infrastructure conditions on the area. Second, it is highly depended on the local government in the technical implementation process. The community is very dependent on the local government in determining the theme, so the role of local government is dominant. Third, the theme of village is not based on the local potency. This is caused by the lack of community ability to identify the icon potentiality. The fourth one is the lack of community awareness in creating the village identity to develop their spirit towards the regional development vision in Semarang in 2016-2021.” (Ngabiyanto et al., 2019:6).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penghambat keberlanjutan Kampung Tematik di beberapa desa yang ada di Kota Semarang yang disebabkan oleh lemahnya konsep yang dibuat dalam proses perencanaan, tingginya kebergantungan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan Kampung Tematik, tema Kampung Tematik yang tidak sesuai dengan potensi wilayah, lemahnya kesadaran dan semangat pembangunan, faktor-faktor tersebut menghambat partisipasi dalam pengembangan Kampung Tematik di Kota Semarang. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengembangan desa wisata, yaitu masyarakat yang memiliki partisipasi aktif di dalamnya (Syarifa & Wijaya, 2019: 517). Aspek partisipasi masyarakat tercantum di dalam tujuan ketiga dari pelaksanaan Kampung Tematik, yaitu peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kampung Jawi bertujuan untuk mengembangkan desanya menjadi tujuan wisata yang bertemakan pelestarian

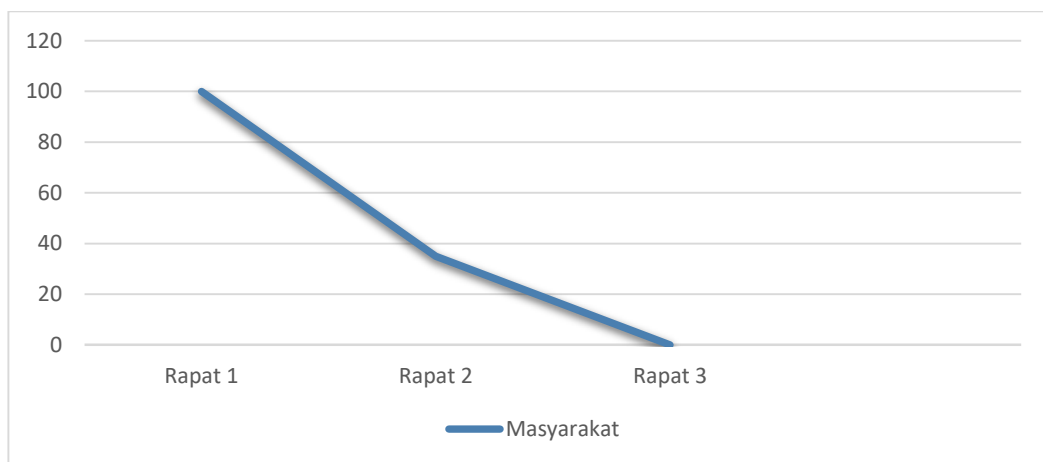
kebudayaan Jawa sehingga memiliki ciri khas di antara Kampung Tematik lainnya. Keberlangsungan kampung tematik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian tema yang diangkat dengan karakteristik kampung, kematangan konsep dan teknis pelaksanaan, serta partisipasi oleh masyarakat (Tamara A & Rahdriawan M, 2017: 2).

Kampung Jawi merupakan salah satu titik sasaran yang bertujuan untuk mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, melakukan penghijauan wilayah, meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif, serta perbaikan kondisi lingkungan dan menghargai potensi sosial ekonomi yang ada di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Tujuan tersebut sesuai dengan latar belakang wilayah yang dulunya merupakan daerah terpinggirkan karena beberapa alasan seperti terjadinya kekeringan, kemiskinan masyarakat, serta kriminalitas yang tinggi karena sering terjadi tindakan begal. Proses pembentukan Kampung Jawi diiringi oleh semangat tokoh masyarakat sekaligus budayawan yang memiliki peran penting. Namun dalam proses pembangunan Kampung Jawi yang terdiri dari proses perencanaan program, pelaksanaan program, hingga pada tahap evaluasi program, tidak cukup jika hanya mengandalkan peran dari satu tokoh masyarakat saja, tetapi harus ada partisipasi di dalamnya. Pengembangan Kampung Jawi terindikasi masalah partisipasi masyarakat dalam mengikutsertakan diri dalam mengambil peran pada proses pengembangan Kampung Jawi. Masalah partisipasi masyarakat diungkapkan dalam wawancara pra penelitian dengan Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, yaitu Bapak

Siswanto yang dilaksanakan pada Sabtu, 24 Desember 2022 yang menghasilkan analisis masalah sebagai berikut:

1. Pada proses perencanaan pembangunan Kampung Jawi digelar 3 kali sesi diskusi bersama masyarakat. Diskusi pertama mengundang 100 warga dan dihadiri secara penuh oleh 100 warga. Diskusi kedua mengundang 75 warga dan dihadiri oleh setengah dari jumlah undangan yang disebarkan, pada diskusi terakhir mengundang 75 warga dan tidak satupun warga hadir dalam undangan diskusi perencanaan pembangunan Kampung Jawi tersebut. Kehadiran masyarakat dalam rangkaian rapat perencanaan Kampung Jawi seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan grafik menurun seperti berikut:

Grafik 1. 2 Kehadiran Rapat



Sumber: Analisis Peneliti

2. Pada proses pelaksanaan pembangunan menara Kampung Jawi, masyarakat berhenti kerja karena kurangnya semangat dan kesatuan tujuan.

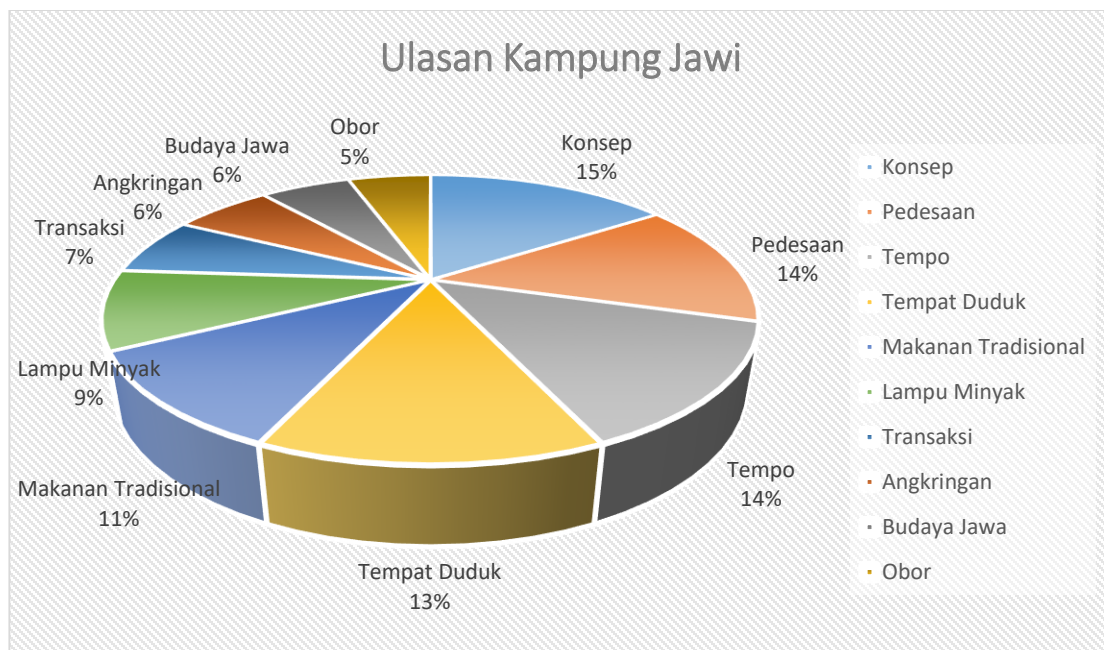
3. Pada proses keberjalanan Kampung Jawi terjadi sengketa dengan pemilik lahan yang dijadikan lokasi Pasar Jaten.
4. Pada proses evaluasi dan diskusi pemindahan lokasi Pasar Jaten yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018 oleh Ketua RW 1, masyarakat hanya diam dan tidak memberikan kritik atau saran terhadap tawaran alternatif yang diajukan oleh Bapak Siswanto.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasna Farras Elian Ridhwan dan Atika Wijaya pada tahun 2019 yang berjudul “Pengembangan Kampung Jawi sebagai Destinasi Wisata di Kota Semarang” Pembuatan proposal Kampung Jawi hanya dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang terdiri dari ketua RW, ketua RT, dan masyarakat yang dituakan sehingga tidak mewakili seluruh masyarakat (Syarifa & Wijaya, 2019: 4). Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan pendapat Cohen dan Uphoff dalam (Soetomo, 2008: 27) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat partisipasi masyarakat di dalam tahap perencanaan harus melibatkan seluruh masyarakat. Masalah lain yang disebutkan di dalam penelitian tersebut adalah masyarakat RW 1 belum banyak melibatkan diri di dalam perawatan infrastruktur dan lingkungan serta dalam proses pembentukan kepengurusan Kampung Jawi. Ditemukan adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh pembangunan yang terpusat pada daerah sekretariat Kampung Jawi saja sehingga dirasa kurang merata. Penelitian lain yang dilakukan oleh Loveani Yastika Putri dan Bitta Pigawati pada tahun 2019 yang berjudul “Wisata Budaya Kampung Jawi di Kota Semarang berdasarkan Aspek

Permintaan dan Penawaran” memunculkan masalah bahwa di dalam pelaksanaan wisata di Kampung Jawi terdapat kelompok masyarakat yang kontra terhadap pelaksanaan kegiatan wisata di Kampung Jawi (Putri & Kota, n.d., 2019: 3).

Peneliti memperoleh data sekunder dari wisatawan yang pernah berkunjung ke Kampung Jawi mengenai keluhan atas beberapa aspek seperti infrastruktur hingga konsep Kampung Jawi yang telah dirangkum dalam grafik di bawah:

Grafik 1. 3 Ulasan Kampung Jawi berdasarkan *Google Review*



Sumber: Analisis peneliti

Berdasarkan ulasan (*review*) pengunjung pada akun *Google Map* Kampung Jawi pada tautan <https://goo.gl/maps/RAcvWofUcCmaifqU7> (*Thematic Kampung Jawi - Google Maps*, n.d.) ditemukan ulasan pengunjung dengan rincian 10% ulasan

berisi kritik dan saran yang telah dikategorikan serta sisanya sebesar 90% ulasan yang hanya memberikan bintang atau unggahan berupa foto kunjungan wisatawan ke Kampung Jawi. Ulasan berisi kritik atau saran tersebut dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori menurut aspek yang paling sering disebutkan oleh pengunjung, yaitu kategori konsep, pedesaan, tempo, dan budaya Jawa yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok tema. Berdasarkan ulasan dalam kelompok tema tersebut sebanyak 30% pengunjung mengungkapkan kurangnya kesesuaian tema Kampung Jawi dengan kondisi asli di lapangan. Kelompok ulasan berikutnya, yaitu sarana dan prasarana Kampung Jawi yang terdiri dari kategori ulasan tempat duduk, transaksi, dan penerangan (obor dan lampu minyak). Ulasan sarana dan prasarana sebanyak 36% pengunjung mengungkapkan beberapa keluhan seperti kurangnya perawatan meja dan kursi serta kebersihan Kampung Jawi serta penerangan yang terlalu minim. Kelompok ulasan berikutnya, yaitu atraksi Kampung Jawi yang terdiri dari kategori ulasan makanan tradisional dan angkringan. Ulasan kelompok atraksi sebanyak 28% pengunjung mengungkapkan kurangnya kualitas atraksi yang ada di Kampung Jawi seperti *live music* modern yang tidak sesuai dengan kebudayaan Jawa hingga kurangnya kualitas makanan di angkringan Kampung Jawi.

Temuan keluhan pengunjung sebesar 36% terhadap sarana dan prasarana Kampung Jawi mengindikasikan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Kampung Jawi. Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, Bapak Siswanto dalam wawancara pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2022 menyatakan

bahwa perawatan sarana dan prasarana yang ada di Kampung Jawi saat ini menjadi tanggung jawab masyarakat yang diwakili oleh Pokdarwis, dirinya juga menjelaskan bahwa masyarakat turut terlibat dalam kerja bakti mingguan yang dihadiri sekitar 20 orang. Berdasarkan data yang didapat dari Bapak Sutikno selaku Ketua RW 1 bahwa jumlah Kepala Keluarga di RW 1 sebanyak 300 Kepala Keluarga, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat RW 1 tergolong rendah dalam perawatan sarana dan prasarana yang ada di Kampung Jawi ditunjukkan dari kegiatan kerja bakti mingguan yang hanya dihadiri oleh 20 orang dari 300 Kepala Keluarga atau hanya 15% dari total Kepala Keluarga yang ada di RW 1. Fenomena di lapangan ini menunjukkan belum tercapainya keluaran dan hasil pelaksanaan Kampung Tematik yang tercantum pada Bab II Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik pada pasal 4 poin c yang berbunyi “terbentuknya semangat masyarakat dalam membangun diri dan wilayah” serta Pasal 5 poin a yang berbunyi “terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan”.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan minimnya kemauan masyarakat RW 1 Kelurahan Sukorejo untuk mengambil peran dalam pengembangan Kampung Jawi membawa keyakinan pada diri peneliti untuk menganalisis tentang partisipasi masyarakat beserta faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat yang dikemas dalam judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan teori partisipasi masyarakat dan pengetahuan tentang Kampung Tematik beserta analisisnya untuk kepentingan penelitian dan perbandingannya dimasa depan serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai sarana pengimplementasian pengetahuan yang dimiliki oleh penulis tentang partisipasi masyarakat serta keberjalanan Kampung Tematik Kota Semarang secara umum dan Kampung Jawi secara khusus.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai rekomendasi kebijakan yang ditujukan pada pelaksanaan program Kampung Jawi dan *stakeholder* yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat secara langsung.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
San, Robertus dkk dalam Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol. 4 No. 1 Tahun 2016 (San et al., 2016)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Desa Kutuh, Kuta Selatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat Desa Kutuh dalam mengembangkan Pantai Pandawa sebagai daya Tarik wisata	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kutuh terdapat dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi, dan pengambilan manfaat
Aminah, Shobichatul dan Presetyo, Iis dalam Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 1 Tahun 2018 (Aminah & Prasetyo, 2018)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Penelitian ini bertujuan di antaranya untuk: 1. Mendeskripsikan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengembangan WKSBM dalam konsep komunikasi <i>multitrack</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tahap partisipasi masyarakat dalam pengembangan WKSBM melalui konsep <i>multitrack</i> melalui proses penilaian, penyusunan rencana, dan desain, pelaksanaan

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
		2. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan WKSBM dalam konsep <i>multitrack</i> , dan 3. Mendeskripsikan faktor partisipasi masyarakat dalam pengembangan WKSBM dalam konsep <i>multitrack</i>		komunikasi, serta evaluasi 2. Bentuk komunikasi meliputi kontribusi masyarakat, tanggung jawab masyarakat, serta peran masyarakat 3. Faktor pengaruh partisipasi masyarakat berasal dari aspek eksternal dan aspek internal
Salsabila, M S dan Fauzi, A M dalam Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 5 No.1 Tahun 2021 (Salsabila M, S & Fauzi A, M, 2021)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri	Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menemukan bentuk partisipasi dalam ide, tenaga, dan kreatifitas masyarakat.
Nabila, A R dan Yuniningsih, Tri dalam <i>Journal of Public Policy</i>	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan:	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bentuk partisipasi masyarakat

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
<p><i>and Management Review Vol. 5</i> (Nabila A. R & Yuniningsih T, 2016)</p>	<p>Wisata Kandri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. 2. Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. 		<ol style="list-style-type: none"> Kelurahan Kandri berbentuk partisipasi semu atau <i>pseudo participation</i>. 2. Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri berada pada tingkat tertinggi, yaitu <i>citizen power</i> 3. Pengetahuan program, kepercayaan masyarakat sekitar, dan jenis kelamin menjadi faktor pendorong, sedangkan tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri
<p>Santoso, Eko Budi dan Moenek, Reydonizar</p>	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsika</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang</p>

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
dalam Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 8 (Santoso E, B & Moenek R, 2019)	n di Kota Balikpapan	n partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan meliputi tujuh tahap atau siklus pembangunan, yang dinilai berdasarkan pandangan ahli dan normatif.	adalah kualitatif	belum berjalan baik dalam pembangunan di Kota Balikpapan. Tiga dari 7 tahap perkembangan, partisipasi dapat dimasukkan dalam kategori nonpartisipasi dan selebihnya partisipasi semu menurut UNESCO. Berdasarkan pemikiran Arstein, dalam enam dari 7 tahap perkembangan, Partisipasi masyarakat masih termasuk dalam kategori tidak berpartisipasi (manipulasi). Hanya di tahapan pelaksanaan pembangunan dalam penanganan sampah non organik dapat dilakukan partisipasi masyarakat dikategorikan sebagai kemitraan yang lemah.
Widayuni, Rifqy	Partisipasi Masyarakat	Penelitian ini bertujuan untuk	Metode penelitian	Hasil penelitian berupa kesimpulan

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
(Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung) (Widayuni R, 2019)	dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sidomukti Kecamatan Gisting	yang digunakan adalah kualitatif	bahwa terdapat kegiatan yang mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga, dan uang dalam pengembangan Desa Wisata Sidomukti
Khikmawanto dalam Jurnal Mozaik Vol. XIV (Khikmawanto, 2022)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah (Studi pada Kampung Tematik “Talas” Pasar Baru Kota Tangerang)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah tepatnya di Kampung Tematik “Talas” yang terdapat di Pasar Baru Kota Tangerang	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori Cohen dan Uphoff telah diimplementasikan di Kampung Tematik Talas. Masyarakat mengikuti beberapa langkah partisipasi mulai dari <i>participation in decision making</i> , <i>participation in implementation</i> , <i>participation in benefit</i> , dan <i>participation in evaluation</i> .
Syarifa, Nisa Hafizhotus dan Wijaya, Atika dalam <i>Solidarity: Jurnal of Education, Society, and</i>	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat yang ada di Kampung Tematik Batik	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian berupa: 1. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diamati dari partisipasi masyarakat pada tahap

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
<i>Culture Vol. 82</i> (Syarifa & Wijaya, 2019)	(Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)	yang berada di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur		<p>perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi</p> <p>2. Dampak dari Kampung Tematik berupa peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>3. Perkembangan belum merata di beberapa RT megakibatkan pelaksanaan kampung tematik ini belum optimal</p>
Kurniati, Rina dan Shifa, Bella, dkk dalam <i>E3S Web Conf. Vol. 317, The 6th International Conference on Energy, Environment, Epidemiology, and Information System (ICENIS 2021)</i>	<i>Sustainability of Kampung Jawi as Tourist Destination in Semarang City During Covid-19 Pandemic</i>	<i>This study aims to examine the sustainability of Kampung Jawi as a tourist destination during the Covid-19 pandemic.</i>	<i>This study uses a quantitative method</i>	<i>The result of this study shows that the level of sustainability of Kampung Jawi is included in the "Medium" category.</i>

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
(Kurniati R et al., 2021)				
Rini, H dan Wijaya, A dkk dalam <i>Proceedings of the 1th Internatiti onal Conference on Environment and Sustainbability Issues</i> (Rini et al., 2019)	<i>Community Participation Towards a Sustainable Thematic Kampung in Semarang</i>	<i>This study aims to compare the different forms of community participation in developing thematic kampung in Semarang</i>	<i>This sudy uses a qualitative method</i>	<i>This study important to learn that different level and form of community participation could contribute to the sustainability aspect of thematic kampung.</i>
Kłoczko-Gajewsk, Anna dalam <i>Journal of Gender, Agriculturea and Food Security</i> (Kłoczko-Gajewska, 2014)	<i>General Characteristcs of Thematic Villages in Poland</i>	<i>This study aims to analyze the characteristics of thematic villages in poland</i>	<i>This study uses qualitative method</i>	<i>The result of study shows that social life in some of the villages declines</i>
Arismayantia b, N K dan Suwenaa, I K dalam <i>Journal of Positive School Pshycology Vol. 6</i> (Arismayanti ab N &	<i>Local Community Participation in Management of Tourism Villages: a Case Study of Penglipuran Village in Bali</i>	<i>The purpose of the study was to analyze the local community's perception of tourism development and their participation in tourism management.</i>	<i>This study uses qualitative method</i>	<i>The result findings in the form of people assessing the development of tourism in the village and the participation of local communities in tourism management is very good and active.</i>

PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL
Suweena I, 2022)				
Polnyotee, M dan Leruksa, C dalam <i>International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS) Vol. 3</i> (Polnyotee M & Leruksa C, 2019)	<i>People's Participation on Sustainable Cultural Tourism Management of Klong Yao Village, Banwhayn Subdistrict, Wapipatum District, Mahasarakham Province, Thailand</i>	<i>This research aimed to investigate people's participation on sustainable cultural tourism management of Klong Yao village, Ban Whay sub-district, Wapipatum district, Mahasarakham province.</i>	<i>This study uses a mixed method</i>	<i>The result of this research revealed that the overview of people's participation at Klong Yao village on sustainable cultural tourism management in all aspects were moderate (X=3.10). The participation in the benefit of receiving is the highest mean (X = 3.36) followed by the operation (X = 3.17), finding problems and causes of the problem (X = 2.98) and decision making and planning (X = 2.89) respectively while the participation in tourism of community's leader in all aspects were excellent.</i>

Sumber: Analisis Peneliti

Analisis terhadap penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan dalam tabel 1.1 di atas menghasilkan penemuan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian

yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti Dinda Ari Putri Pamungkas (2022) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh San, Robertus dkk (2016) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Desa Kutuh, Kuta Selatan” memiliki persamaan variabel Partisipasi Masyarakat dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terletak pada lokus yang digunakan. Penelitian terdahulu terletak di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Desa Kutuh, Kuta Selatan, sedangkan penelitian ini terletak di Kampung Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aminas, S dan Prasetyo, Iis (2018) dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)” memiliki persamaan variabel penelitian Partisipasi Masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada teori konsep yang digunakan untuk menganalisis tahapan partisipasi masyarakat. Penelitian terdahulu menganalisis tahapan partisipasi masyarakat melalui komunikasi *multitrack*, sedangkan penelitian ini menganalisis tahapan partisipasi masyarakat menggunakan teori Cohen dan Uphoff serta Dwiningrum yang terdiri dari tahapan *participation in decision making*,

participation in implementation, participation in benefits, dan participation in evaluation.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila, M S dan Fauzi, A M (2021) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)” memiliki persamaan variabel penelitian Partisipasi Masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada tahapan partisipasi masyarakat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila, A R dan Yuniningsih, T (2016) dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri” memiliki persamaan pada variabel penelitian, yaitu Partisipasi Masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian terdahulu yang berusaha untuk menemukan bentuk-bentuk partisipasi menggunakan teori partisipasi dari Midgley, yaitu *authentic participation* dan *pseudo-participation*, sedangkan pada penelitian saat ini berusaha menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi menggunakan teori Cohen and Upoff untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi, pengambilan keputusan, serta tahap evaluasi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, E B dan Moenek, R (2018) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Balikpapan”

memiliki persamaan variabel Partisipasi Masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian terdahulu untuk menganalisis partisipasi berdasarkan 7 tingkatan partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein, sedangkan pada penelitian ini berusaha menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi menggunakan teori Cohen and Upoff untuk menganalisis partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan hingga evaluasi.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Widayuni, R (2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus” memiliki persamaan variabel Partisipasi Masyarakat. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam menyertakan teori Davis tentang variabel partisipasi dalam bentuk pikiran, uang dll sebagai alat bantu yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, namun penelitian terdahulu tidak menganalisis partisipasi pada tahap-tahap pengembangannya dan hanya menganalisis bentuk partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat saja.
7. Penelitian yang dilakukan Khikmawanto (2022) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah (Studi pada Kampung Tematik “Talas” Pasar Baru Kota Tangerang)” memiliki persamaan variabel Partisipasi serta penggunaan teori Cohen dan Uphoff sebagai alat bantu analisis atas partisipasi masyarakat namun penelitian saat ini memiliki inovasi yang didasari oleh teori Davis untuk melihat peran masyarakat dalam bentuk nyata (uang,

tenaga, pikiran, hingga barang) sehingga diharapkan hasil penelitian akan optimal dengan adanya analisis terhadap sumbangsih nyata yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam proses pengembangan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifa, N H dan Wijaya, A (2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)” memiliki kesamaan pada variabel Partisipasi Masyarakat dan kesamaan tema penelitian, yaitu Kampung Tematik namun penelitian terdahulu mengambil lokus penelitian di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sedangkan penelitian saat ini mengambil lokus penelitian di Kampung Jawi Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis partisipasi dalam konsep pemberdayaan menggunakan teori Longwe, sedangkan penelitian saat ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi menggunakan teori Cohen and Upoff untuk menganalisis partisipasi masyarakat.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati, R dkk (2021) dengan judul “*Sustainability of Kampung Jawi as Tourist Destination in Semarang City During Covid-19 Pandemic*” memiliki persamaan lokus penelitian yaitu Kampung Jawi. Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis aspek keberlanjutan Kampung Jawi sebagai sektor pariwisata pada saat pandemi

berlangsung melalui 3 aspek, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan, sedangkan penelitian saat ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi secara menyeluruh dari tahun 2016-2022 pada tahap pengambilan keputusan, implementasi, penerimaan manfaat, hingga tahap evaluasi.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rini, H S dkk (2019) dengan judul “*Community Participation Towards a Sustainable Thematic Kampung in Semarang*” memiliki persamaan variabel Partisipasi dan tema penelitian yaitu Kampung Tematik namun dilakukan penelitian secara luas di Kota Semarang sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pembahasan pada lingkup yang lebih sempit di Kampung Jawi yang terletak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Kłoczko-Gajewsk (2013) dengan judul “*General Characteristics of Thematic Villages in Poland*” memiliki persamaan tema penelitian yaitu Kampung Tematik namun lokus penelitian terdahulu berada di luar negeri tepatnya Polandia, sedangkan penelitian saat ini berada di dalam negeri. Penelitian terdahulu menganalisis karakteristik Kampung Tematik sebagai standar yang dapat menjadi referensi penerapan Kampung Tematik di Indonesia.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Arismayantiab, N K dan Suwenaa, I K (2022) dengan judul “*Local Community Participation in Management of Tourism Villages: a Case Study of Penglipuran Village in Bali*” memiliki persamaan

variabel Partisipasi namun perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu menganalisis partisipasi pada kegiatan pengelolaan desa wisata, sedangkan penelitian saat ini menganalisis partisipasi pada tahapan pengembangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

13. Penelitian yang dilakukan Polnyotee, M dan Leruksa, C (2021) dengan judul *“People’s Participation on Sustainable Cultural Tourism Management of Klong Yao Village, Banwhayn Subdistrict, Wapipatum District, Mahasarakham Province, Thailand”* memiliki persamaan variabel Partisipasi namun fokus pembahasan penelitian terdahulu pada tahap pengelolaan, sedangkan penelitian ini berusaha menganalisis partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

1.5.2 Administrasi Publik

Masyarakat Indonesia mulai mengenal istilah administrasi dari tingkat desa atau kelurahan untuk mengurus surat menyurat yang diperlukan seperti urusan Kartu Tanda Penduduk atau KTP, Kartu Keluarga atau KK, serta surat lainnya sebagai pendukung administrasi sebagai warga negara. Pengalaman masyarakat dalam berhadapan dengan lingkup administrasi menggiring pemahaman secara sederhana mengenai konsep administrasi sebagai kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat yang dilakukan oleh pegawai kelurahan atau desa setempat. Herbert A. Simon (dalam Pasolong, 2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi, yaitu kegiatan kerjasama kelompok agar terwujud tujuan kolektif.

Pemikiran masyarakat Indonesia akan arti sebenarnya dari Administrasi memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi para pakar ilmu administrasi untuk mampu menjelaskan konsep administrasi melalui (1) konsep administrasi secara etimologis, (2) administrasi secara sempit, dan (3) administrasi secara luas.

a. Administrasi secara etimologis

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang memiliki arti “*to serve*” apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Administrasi juga dapat diartikan secara etimologis dari bahasa Belanda “*administratie*” yang memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris “*administration*”. Kedua kosa kata tersebut apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “administrasi”.

b. Administrasi secara sempit

Wempy Banga menjelaskan administrasi dalam artian sempit sebagai sekumpulan aktivitas yang memiliki sifat ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat-menyurat, pencatatan agenda masuk dan agenda yang keluar, penggandaan, pengetikan, pendistribusian, pengarsipan surat. Administrasi juga meliputi kegiatan pengelolaan data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi khususnya pemimpin sebagai bahan penentu pengambilan keputusan serta pembentukan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Banga, 2018: 12). Pandangan serupa mengenai administrasi juga disampaikan oleh S. Prajudi

Atmosudirjo bahwa tata usaha berkaitan secara erat dengan konsep administrasi dan berfungsi sebagai pengendalian informasi (*the handling of information*) (Atmosudirdjo, 1994: 25).

c. Administrasi secara luas

Konsep Administrasi secara luas dimulai dari dua karya pemikiran ilmiah yang datang dari Amerika Serikat dengan judul “*shop management*” yang dikenalkan oleh seorang teorisi manajemen ilmiah bernama Frederick Winslow Taylor (1911) dan karya ilmiah teorisi Eropa yang berjudul “*general and industrial management*” yang dibawa oleh Henry Fayol (1930) (dalam Astuti et al., 2020: 14). Pemikiran brilian yang dibawa oleh dua ahli tersebut menjadi pembuka perkembangan disiplin ilmu administrasi secara ilmiah.

Beberapa definisi administrasi (dalam Astuti et al., 2020: 15) secara luas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) The Liang Gie (1980) mengungkapkan administrasi sebagai rangkaian pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam konsep kerjasama mencapai tujuan tertentu.
- 2) Francis Donovan dan Alun C. Jackson (1991) menjelaskan administrasi sebagai perwujudan bentuk arahan, implementasi, analisis, perintah, presentasi keputusan, dan pertimbangan terhadap kebijakan.

Publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*public*” yang memiliki arti rakyat umum, rakyat, umum, dan orang banyak. Makna publik perlu dibatasi untuk menyamakan persepsi yang ada. Syafi’ie dkk 1999 (dalam Pasolong H, 2014: 7) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Chandler & Plano (dalam Keban, 2004: 3) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan personil publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Paradigma administrasi publik mengalami pergeseran yang bisa dilihat pada peristiwa yang dijelaskan oleh Nicholas Henry terkait revisi terhadap paradigma administrasi publik dari tahun 1975. Perkembangan paradigma administrasi publik juga dapat diketahui dari era “*administration dichotomy*” yang mengalami perkembangan secara berkelanjutan dan saling melengkapi hingga sampai di era paradigma “*governance*”.

Perkembangan paradigma administrasi publik oleh Nicholas Henry (dalam Astuti et, al., 2020:22) dapat diilustrasikan melalui daftar berikut:

- 1) *The Politics - Administration Dichotomy*, (1900 – 1926);
- 2) *The Principles of Administration*, (1927 – 1937);
- 3) *Public Administration as Political Science*, (1950 – 1970);

- 4) *Public Administration as Management*, (1956 – 1970);
- 5) *Public Administration as Public Administration*, (1970 – sekarang);
- 6) *Governance*, (1990 – sekarang).

Paradigma pertama, yaitu “*The Politics Administration Dichotomy*” mempunyai penekanan terhadap pemisahan aspek yang berkaitan dengan politik dan aspek yang berkaitan dengan fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan oleh birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Paradigma ini mengandung gagasan utama yang sama dengan pendapat dari Woodrow Wilson di dalam esainya yang berjudul “*The Study of Administration*” (Basheka B, 2012: 34).

Paradigma kedua yaitu “*The Principles of Administration*” atau dikenal dengan prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937), paradigma ini menyebarkan pandangannya bahwa administrasi dipercaya memiliki nilai-nilai yang bersifat universal atau umum. Sifat universal tersebut diartikan bahwa administrasi negara dapat diletakkan ke dalam setiap praktik-praktik organisasi dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Sifat umum yang dimiliki oleh administrasi negara membantu generalisasi ilmu menjadi lebih luas.

Paradigma ketiga diberikan sebuah gambaran dari Henry yang menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik (Henry, 2007: 10). Sejatinya administrasi publik memiliki induk ilmu, yaitu ilmu politik yang kemudian mengalami perubahan

dan pembaruan yang mengakibatkan terbentuknya ilmu administrasi publik sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Hal tersebut menyebabkan adanya perdebatan oleh ilmuwan politik yang masih terus memperjuangkan kembalinya ilmu administrasi ke dalam ilmu politik. Hasil dari paradigma ini adalah adanya usaha penetapan batas-batas yang jelas tentang hubungan konseptual antara administrasi negara dengan politik.

Paradigma keempat yang disebutkan oleh Henry adalah "*public administration as management*" paradigma ini menjadi tanda keberhasilan ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik ke ranah manajemen. Administrasi kemudian memasuki tahap baru, yaitu "*new public management*" yang dimulai dari munculnya paradigma "*public administration as public administration*". Administrasi publik kemudian difokuskan ke dalam aspek hierarki dan birokrasi yang mengalami pergeseran ke arah swasta dan pasar. *New public management* atau yang disingkat dengan NPM menggeser manajemen sektor publik ke arah swasta yang dikonsept dengan model bisnis untuk selanjutnya model ini disebut sebagai konsep "*governance*".

Paradigma terakhir yang diungkapkan oleh Henry adalah *governance*. *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang para pemimpin politik demi mewujudkan kesejahteraan warga negara atau rakyatnya. *Governance* mengandung proses yang kompleks dengan melibatkan beberapa sektor masyarakat untuk memegang kekuasaan, melaksanakan, serta menyebarkan kebijakan publik yang mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Kekuasaan yang dijalankan oleh sektor-sektor yang berpartisipasi dalam

masyarakat selalu untuk kebaikan bersama karena sangat penting untuk menuntut rasa hormat dan kerja sama dari warga dan negara. Dengan demikian, banyak hal tentang tata kelola atau pemanfaatan sumber daya yang tepat dan efektif (Tamayo, 2014: 1). *Governance* menjalankan fungsi pemerintahan dengan konsep kemitraan yang terdiri dari penduduk lokal, organisasi masyarakat, serta sektor publik dan swasta (Gibson, 2011: 28).

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat atau publik. Hubungan tersebut terjadi guna mencapai tujuan, yaitu meningkatkan taraf tanggung jawab atau responsibilitas dari sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan juga mempraktikkan konsep manajerial sehingga program yang disusun dapat dilaksanakan dengan rasional, efektif, dan efisien. Di dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat berkembang di dalam paradigma *Governance* yang di dalamnya terdapat praktik kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat lokal Kampung Jawi, serta lembaga lain yang terkait bahkan *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Interaksi antar peran tersebut penting untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi.

1.5.3 Manajemen Publik

James A. F. Stoner (dalam Handoko, 2012: 8) berpendapat tentang makna manajemen sebagai rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh individu di dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pendapat tersebut selaras dengan fungsi manajemen yang diungkapkan oleh George R. Terry, yaitu *planning, organizing, actuating, and controlling*. Perspektif berbeda tentang manajemen datang dari Siswanto, di dalam bukunya “Pengantar Manajemen” yang berpendapat tentang arti manajemen (*management*) sebagai pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan lain lain (2012: 15).

Ott, Hyde & Shafritz (dalam Wijaya et al., 2014: 87) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan spesialisasi baru dari manajemen dan bagian yang tidak terlepas dari ilmu administrasi publik yang di dalamnya menjelaskan mengenai rencana program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia serta evaluasi program dan audit. Manajemen publik berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi manajemen baik secara kelompok maupun individu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Ha et al., 2022: 3). J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz (dalam Pasolong H, 2014: 96)

menjelaskan tentang perkembangan manajemen publik yang akan menghadapi isu-isu menantang di masa transisi sebagai berikut:

1. Munculnya privatisasi di lingkungan pemerintah yang menjadi alternatif di dalam pelayanan publik;
2. Adanya rasionalitas dan akuntabilitas;
3. Sistem perencanaan dan kontrol;
4. Aspek keuangan dan penganggaran; dan
5. Produktifitas sumber daya manusia.

Pendapat-pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa manajemen publik memiliki keterkaitan secara erat mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan baik secara berkelompok ataupun secara individu di dalam masyarakat dengan memfokuskan pada optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu fokus dari manajemen publik adalah pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi secara aktif. Oleh karena itu, manajemen publik mengambil peran yang penting di dalam penelitian ini untuk membantu menerjemahkan program-program pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang dimiliki.

1.5.4 Partisipasi

Partisipasi masyarakat telah hadir dan dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Bangsa Indonesia sejak lama. Partisipasi diartikan oleh Mikkelsen sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Kerjasama, musyawarah, dan gotong royong merupakan bagian dari partisipasi (1999: 3). Partisipasi dimaknai oleh Isbandi sebagai keikutsertaan masyarakat di dalam proses identifikasi terhadap masalah serta potensi yang berkembang di masyarakat, keikutsertaan dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan untuk mencari alternatif solusi atas masalah yang telah diidentifikasi, serta keikutsertaan masyarakat di dalam proses evaluasi atas perubahan yang terjadi (2007:27). Berangkat dari pernyataan tersebut didapatkan tiga unsur penting dari partisipasi, sebagai berikut:

1. Partisipasi mengandung keterlibatan perasaan serta mental lebih dari keterlibatan jasmaniah.
2. Adanya kesenangan dan sukarela dalam memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan oleh kelompok.
3. Partisipasi diikuti oleh rasa tanggung jawab oleh setiap anggota kelompok yang telah menyetujui keterlibatan.

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan mulai dari kegiatan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal (Adisasmita R, 2006: 25).

Tjokroamidjojo (dalam Rohman et al., 2012: 46) mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi, bahwa partisipasi merupakan bentuk keterlibatan di dalam proses penentuan arah, strategi, serta kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Fokus partisipasi (dalam Rohman et al., 2012: 46) adalah munculnya keterlibatan mental serta emosi masyarakat. Adanya keterlibatan fisik secara pribadi semata-mata di dalam sebuah kelompok. Tanpa keterlibatan aspek tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi. Dr Made Pidarta (dalam Dwiningrum S. I. A, 2011: 50) menyatakan pengertian yang selaras mengenai partisipasi yang merupakan pelibatan seseorang atau kelompok di dalam suatu kegiatan secara mental dan emosi serta fisik dengan segala kemampuan yang dimilikinya (inisiatif) dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan serta bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berperan secara efektif dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Hal ini berarti memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk aktif mengelola sumber daya yang ada, mengelola kemampuan mereka sendiri, menjadi subyek bukan sebagai obyek dalam pembangunan, berperan aktif dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang mempengaruhi tempat itu (Palimbunga I. P, 2017: 18). Berdasarkan beberapa pendapat tentang partisipasi yang telah diungkapkan, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat berperan secara aktif dalam melibatkan diri mengelola sumber daya di sebuah destinasi wisata yang memiliki potensi tertentu di daerah

masyarakat tersebut tinggal. Partisipasi masyarakat di dalam pengembangan desa wisata cenderung menuju ke dampak positif dibandingkan ke dampak negatif bagi masyarakat lokal (Hermawan, 2016:3).

Bentuk dan Jenis Partisipasi

Berdasarkan pendapat Midgley (dalam Santoso & Moenek, 2019: 7) mengungkapkan 2 (dua) bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat, yaitu partisipasi nyata atau otentik (*authentic participation*) dan partisipasi semu (*pseudo-participation*). Dalam mencapai kategori partisipasi otentik/nyata (*authentic participation*) terdapat 3 (tiga) indikator yang harus dipenuhi. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Terdapat sumbangsih atau bantuan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program,
2. Penerimaan manfaat secara merata, dan
3. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program atau kebijakan.

Menurut Keith Davis (dalam Ibori A, 2013: 4) berpendapat terkait jenis-jenis partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat, seperti:

1. Pikiran (*psychological participation*).
2. Tenaga (*physical participation*).
3. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*)

4. Uang (*money participation*).
5. Keahlian (*participation with skill*).
6. Barang (*material participation*).

Bentuk partisipasi masyarakat (dalam Hamijoyo, 2007: 21) terdiri dari:

1. Partisipasi tenaga, adalah partisipasi dalam bentuk usaha-usaha yang mampu menunjang keberhasilan program.
2. Partisipasi uang, adalah partisipasi dalam bentuk pembiayaan kegiatan program yang biasanya partisipasi uang hanya diberikan oleh beberapa masyarakat.
3. Partisipasi buah pikiran, adalah partisipasi dalam bentuk pendapat yang konstruktif.
4. Partisipasi keahlian, adalah partisipasi dalam bentuk keahlian masyarakat yang perlu diwujudkan demi kelancaran program.
5. Partisipasi barang, adalah pemberian atau penyumbangan barang dengan kepemilikan pribadi untuk menunjang keberhasilan program.

Bentuk partisipasi masyarakat juga dijelaskan (dalam Huraerah A, 2011: 116) sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan oleh partisipan dalam anjang sana pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi sosial, yang diberikan oleh partisipan sebagai simbol *keguyuban* atau kerukunan.

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan oleh partisipan di dalam berbagai kegiatan perbaikan atau pembangunan desa dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan, yang diberikan oleh partisipan untuk mendorong aneka bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam usaha pembangunan dan sebagainya.

Sistem dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan sistem serta mekanismenya. Menurut Cohen dan Upoff di dalam bukunya yang berjudul “*Rural Development Participation; Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*” terdapat empat tahap partisipasi, yaitu:

1. *Participation in decision making*, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Pada tahap ini masyarakat diizinkan untuk menilai rencana atau program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian atas kebijakan yang sedang berjalan. Pada tahap partisipasi ini bertujuan untuk memetakan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. *Participation in implementation*, yaitu partisipasi dalam pelaksanaan operasional program pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat dilihat dari jumlah keaktifan serta bentuk partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat seperti pikiran, uang, ataupun tenaga yang ditunjukkan secara langsung

atau tidak langsung baik diberikan satu kali atau berulang, serta semangat partisipasi yang ada di masyarakat.

3. *Participation in benefits*, yaitu partisipasi masyarakat dalam menikmati manfaat hasil dari program pembangunan yang dicapai. Tahap ini ditandai dengan munculnya dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan program pembangunan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya, serta partisipasi atas kegiatan pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam tahap ini terdiri dari adanya pemerataan yang ditimbulkan dari pengembangan program oleh pemerintah berupa pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat juga pemanfaatan atas pemerataan pembangunan fasilitas sebagai dampak pembangunan program seperti pembangunan jaringan jalan, jembatan, serta gedung atau sarana prasarana sosial lainnya.
4. *Participation in evaluation*, yaitu partisipasi masyarakat dalam menyertakan diri terhadap penilaian dan kegiatan pengawasan pembangunan serta hasil pembangunan. Tahap ini diwujudkan melalui pemberian kritik dan saran atau bahkan berbentuk protes masyarakat (Cohen J & Uphoff T, 1997: 27-55)

Dwiningrum membedakan partisipasi ke dalam 4 tahapan Cohen dan Uphoff yang disempurnakan (dalam Dwiningrum S. I. A, 2011: 61) sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan gagasan atau ide sebagai alternatif yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi ini seperti kehadiran masyarakat dalam diskusi,

rapat, pemberian tanggapan atau sumbangan pemikiran, serta menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program. Partisipasi ini menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan administrasi, pengelolaan sumber daya program, pengelolaan dana, serta penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pencapaian program secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kualitas seperti peningkatan *output* program, sedangkan aspek kuantitas dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan keseluruhan permasalahan program serta bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan program.

Tjokroamidjojo (dalam Rohman et al., 2012: 48) membagi partisipasi ke dalam tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah,
- b. Partisipasi atau keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,
- c. Partisipasi atau keterlibatan dalam memetik manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Tahapan partisipasi (dalam Nasution Z, 2009: 42) disimpulkan ke dalam tiga jenjang, sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dalam tahapan ini masyarakat akan terlibat pada perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan masyarakat desa disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat terkait. Tahap ini akan meminta masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, ataupun saran.
- b. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan, dalam tahapan ini masyarakat terlibat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program. Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa barang, tenaga, material, uang, hingga informasi yang memiliki nilai guna dalam pelaksanaan program.
- c. Partisipasi masyarakat dalam proses pemanfaatan hasil, dalam tahapan ini masyarakat terlibat dalam usaha pemanfaatan hasil program dan menikmati usaha bersama yang telah dilaksanakan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi

Menurut Dorodjatin (dalam Slamet Y, 2003: 18) terdapat tiga faktor utama yang mampu mendukung terciptanya partisipasi masyarakat, yaitu (1) kemauan, kemauan yang dimaksud berasal dari masyarakat untuk mengambil peran dalam rangkaian pelaksanaan program pembangunan. Kemauan memiliki keterkaitan dengan psikologis individu atau masyarakat (2) kemampuan, kemampuan berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang sehingga dapat berpartisipasi, dan (3)

kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kesempatan berkaitan dengan kemauan politik atau *political will* dari pemangku kewenangan atau *stakeholder* untuk melibatkan masyarakat dalam program yang sedang berjalan sehingga kesempatan berkaitan dengan aspek yang ada di luar dari diri pelaku atau masyarakat. Selain faktor pendukung tentunya terdapat faktor penghambat yang dikemukakan oleh Watson (dalam Soetomo, 2008: 214) bahwa ketergantungan menjadi salah satu sifat yang dimiliki oleh individu atau masyarakat yang mampu menghalangi terjadinya sebuah perubahan atau pembangunan. Ketergantungan yang dimiliki masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan menghambat munculnya partisipasi aktif dari masyarakat. Ketergantungan tidak akan menimbulkan inisiatif di kalangan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat secara mandiri. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dikategorikan ke dalam faktor eksternal dan faktor internal seperti berikut:

a. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (dalam Khikmawanto, 2022: 6) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat partisipasi yang terdiri dari *stakeholder* seperti pemerintah daerah atau pun pengurus desa dan/atau kelurahan (RT/RW), fasilitator program, atau pihak-pihak yang menjadi petaruh kunci dalam arti memiliki peran yang signifikan terhadap keberjalanan program pembangunan.

b. Faktor internal

Faktor penghambat partisipasi masyarakat secara internal berasal dari dalam diri kelompok atau masyarakat. Faktor internal dapat berasal dari individu-individu yang bergabung sebagai satu kesatuan kelompok. Chakrabarti (dalam Wahyuni Y. T & Manaf A, 2017: 474) menyebutkan faktor-faktor internal yang paling sering menjadi penghambat partisipasi adalah usia dan jenis kelamin. Hal tersebut karena semakin tua umur seseorang maka keterbukaan terhadap nilai-nilai baru akan semakin rendah yang disebabkan oleh kepercayaan akan nilai-nilai lama yang dirasa lebih baik. Usia juga berbanding lurus dengan kemampuan fisik yang dimiliki untuk berpartisipasi sehingga semakin muda usia seseorang idealnya memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sedangkan faktor jenis kelamin memiliki pengaruh atas pembagian tugas dalam sebuah program pembangunan yang biasanya dibagi dalam kategori tugas laki-laki dan tugas perempuan. Pembagian tugas tersebut akan menimbulkan munculnya kewajiban dan hak yang berbeda antara masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan.

Dwiningrum (2011: 74) di dalam bukunya yang berjudul “Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan” merumuskan faktor-faktor yang mungkin menjadi ancaman atau penghambat di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat,

- b. Aspek-aspek tipologis,
- c. Aspek geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya),
- d. Aspek demografis (jumlah penduduk).
- e. Aspek ekonomi (desa miskin/tertinggal).

1.5.5 Konsep Kampung Tematik

Pengertian Kampung Tematik sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya Kampung Tematik dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Perbaikan lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
3. Peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat;
5. Peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai semangat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;

6. Memberi pengaruh positif bagi kampung-kampung lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung tematik serupa;
7. Menggugah pengaruh di dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk mendukung pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang;
8. Mendorong peningkatan perputaran ekonomi lokal/wilayah,
9. Menambah tujuan atau destinasi wisata.

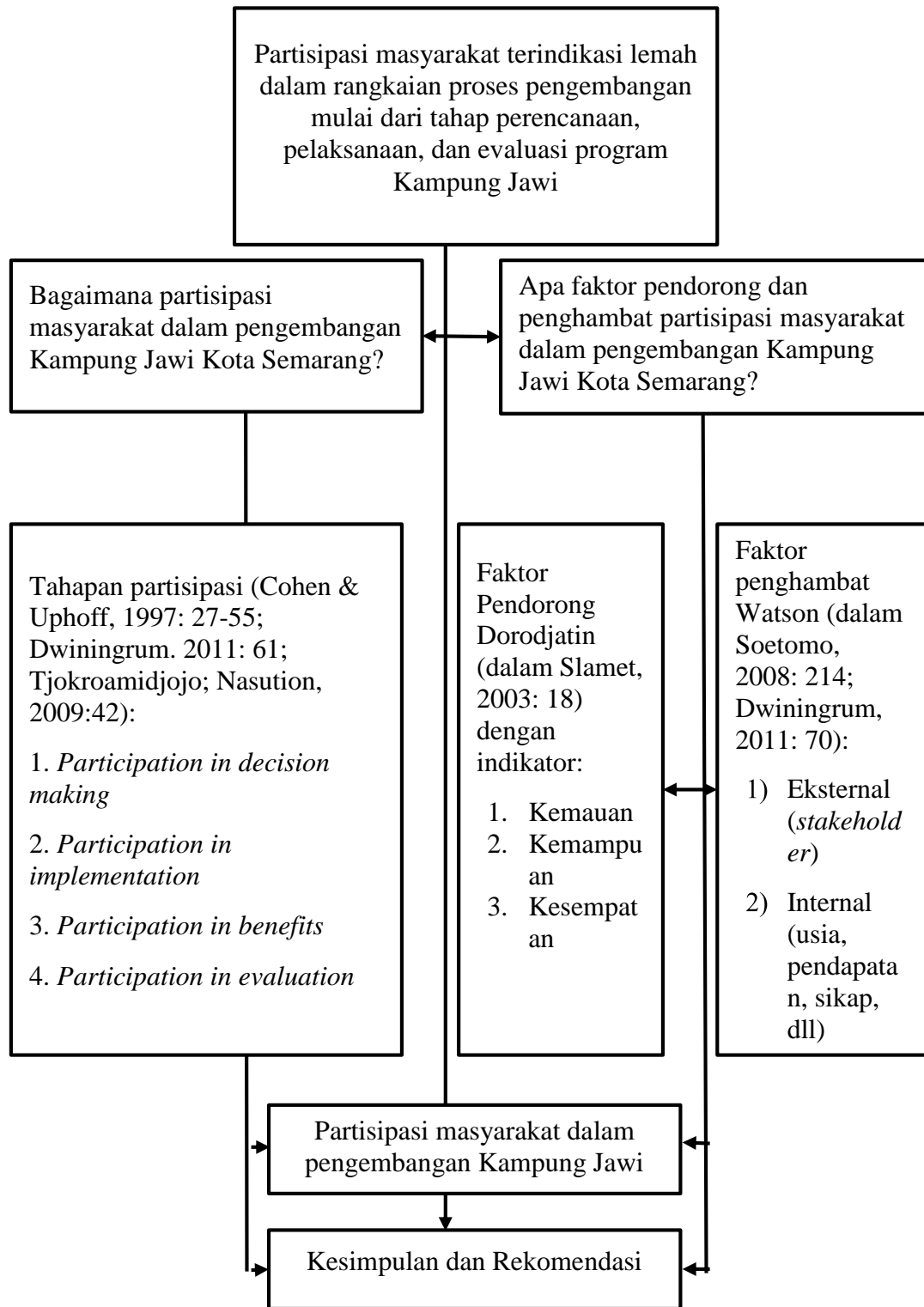
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik juga menyebutkan hasil dari pelaksanaan Kampung Tematik meliputi:

1. Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan;
2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat;
3. Terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya:
 - a. Jalan lingkungan yang baik;
 - b. Saluran air yang baik, dan
 - c. Sanitasi dan penghijauan yang baik.

Pembangunan Kampung Tematik dimulai dari hadirnya usulan masyarakat untuk mengajukan daerahnya sebagai Kampung Tematik dengan terlebih dahulu menyusun proposal dan menentukan tema Kampung Tematik sesuai dengan kelayakan sosial, ekonomi, dan infrastruktur serta potensi lokal yang dimiliki untuk kemudian

diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Pembangunan Kampung Tematik yang biasanya diawali dengan ide untuk melakukan sesuatu yang baru, berbeda, untuk membuat masyarakat lebih aktif secara sosial, untuk membangun desa; membuka pemikiran dan pertemuan kelompok inisiator baru (Kloczko-Gajewska A, 2014: 8).

Tabel 1. 2 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Partisipasi masyarakat seperti yang dijelaskan oleh (Mikkelsen, 1999: 3; Isbandi, 2007: 27; Adisasmita 2006: 25; Rohman et al., 2012: 46; Palimbunga, 2017: 18) merupakan kemauan masyarakat untuk mengambil peran dalam proses pembangunan. Pengertian partisipasi tersebut disertai dengan penjelasan peran yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa buah pikiran, tenaga, uang, hingga barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Kampung Jawi dengan melihat tahapan partisipasi yang menjadi aspek fundamental. Program Kampung Jawi melewati tahapan proses perkembangan yang dimulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemanfaatan, hingga evaluasi. Analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dilakukan secara teoritik dengan menganalisis keterlibatan partisipasi masyarakat di dalam empat tahap partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli beserta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat di Kampung Jawi.

1. Peneliti akan menganalisis partisipasi masyarakat melalui pengamatan terhadap empat tahap partisipasi (Cohen & Uphoff, 1997: 27-55; Dwiningrum. 2011: 61; Tjokroamidjojo; Nasution, 2009:42) sebagai berikut:
 - a. *Participation in decision making*, (Cohen & Uphoff, 1997: 27-55; Dwiningrum. 2011: 61; Tjokroamidjojo; Nasution, 2009:42) menjelaskan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan atau pengambilan keputusan merupakan

tahap awal penilaian program oleh masyarakat melalui dukungan atau penolakan. Peneliti akan menganalisis pengambilan peran oleh masyarakat Kampung Jawi pada tahap perencanaan yang terjadi pada tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Sumbangan gagasan, pendapat, serta buah pikir di dalam rapat-rapat yang dilaksanakan selama proses perencanaan serta keterlibatan peran masyarakat dalam menentukan tema dan pengambilan keputusan menjadi alat analisis peneliti dalam mengetahui partisipasi masyarakat pada tahap ini.

- b. *Participation in implementation*, (Cohen & Uphoff, 1997: 27-55; Dwiningrum. 2011: 61; Tjokroamidjojo; Nasution, 2009:42) menilai partisipasi masyarakat melalui tanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Peneliti akan melihat sumbangsih masyarakat berupa ide atau gagasan, uang, tenaga, hingga bahan (material bangunan, lahan, dan lainnya). Keterlibatan masyarakat dalam segala bentuk aktivitas seperti kerja bakti atau gotong royong serta pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk peran serta organisasi perangkat desa seperti Pokdarwis Kampung Jawi, Karang Taruna, hingga pemangku jabatan seperti Ketua Rw, serta pihak pemerintah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi pengembangan Kampung Jawi.
- c. *Participation in benefits*, (Cohen & Uphoff, 1997: 27-55; Dwiningrum. 2011: 61; Tjokroamidjojo; Nasution, 2009:42) peneliti akan menganalisis dampak pengembangan Kampung Jawi yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan perkembangan ekonomi atau pendapatan masyarakat sekitar Kampung Jawi, dan pemanfaatan hasil

pembangunan (jalan, gedung, dan jembatan yang mengarah ke lokasi Kampung Jawi) sebagai dampak dari program pengembangan Kampung Jawi.

- d. *Participation in evaluation*, (Cohen & Uphoff, 1997: 27-55; Dwiningrum. 2011: 61; Tjokroamidjojo) peneliti akan menganalisis kritik ataupun saran yang disampaikan kepada pemerintah atau pemangku jabatan di Kelurahan Sukorejo (Ketua RW/Ketua RT) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menilai kesesuaian pelaksanaan Kampung Jawi dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat Kampung Jawi dan tujuan pembentukan Kampung Tematik yang telah ditetapkan di awal.
2. Faktor pendorong sesuai dengan pendapat Dorodjatin (dalam Slamet Y, 2003: 18) dengan indikator:
 - a. Kemauan masyarakat Kampung Jawi untuk berpartisipasi, dipengaruhi oleh:
 - 1) Harapan masyarakat untuk mendapatkan dampak baik dari kegiatan Pengembangan Kampung Jawi.
 - 2) Dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat seperti Ketua RW, Ketua RT, hingga anggota Pokdarwis Kampung Jawi.
 - b. Kemampuan masyarakat Kampung Jawi untuk berpartisipasi, dipengaruhi oleh kemampuan/keterampilan masyarakat di bidang seni budaya dan kuliner untuk melakukan pengembangan atraksi Kampung Jawi.
 - c. Kesempatan bagi masyarakat Kampung Jawi untuk berpartisipasi, dipengaruhi oleh:

- 1) Ketersediaan informasi tentang perencanaan program Kampung Jawi oleh pengelola.
 - 2) Pendampingan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada masyarakat sekitar Kampung Jawi
 - 3) Waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan Kampung Jawi.
3. Faktor penghambat partisipasi masyarakat akan dianalisis menggunakan pendapat Watson (dalam Soetomo, 2008: 214; Dwiningrum, 2011: 70) dengan indikator:
- a. Faktor penghambat eksternal partisipasi masyarakat, ditinjau dari:
 - 1) Sikap ketergantungan yang ditunjukkan oleh pengelola Kampung Jawi terhadap Pemkot Semarang atau instansi lain terkait.
 - 2) Fenomena global yang terjadi dan berdampak menghambat terhadap pengembangan Kampung Jawi selama proses perencanaan, implementasi, pemanfaatan, hingga evaluasi.
 - b. Faktor penghambat internal partisipasi masyarakat, ditinjau dari:
 - 1) Batasan keterlibatan usia masyarakat di sekitar Kampung Jawi yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua dalam berpartisipasi mengembangkan Kampung Jawi.
 - 2) Perbedaan hak dan kewajiban yang didasari oleh jenis kelamin masyarakat sekitar Kampung Jawi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan terhadap pengembangan Kampung Jawi.

- 3) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di lingkungan masyarakat sekitar Kampung Jawi dalam melibatkan diri dalam proses pengembangan program.

Berdasarkan indikator dari faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kampung Jawi, peneliti akan menganalisis peran pemerintah dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Jawi yang berasal dari pihak *stakeholder* seperti, Bappeda sebagai pengawas keberjalanan Kampung Jawi, individu yang berperan sebagai motivator berdirinya Kampung Jawi, hingga Ketua RW 1 sebagai pemangku jabatan sekaligus mengetahui sejarah asal berdirinya Kampung Jawi. Selain menganalisis dari sisi *stakeholder*, peneliti juga berusaha menganalisis faktor internal yang berasal dari karakteristik masyarakat yang tinggal di sekitar Kampung Jawi melalui usia dan jenis kelamin untuk dapat menilai keterkaitan aspek-aspek tersebut terhadap keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Indikator	Aspek yang Diamati
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Jawi	<i>Participation in decision making</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumbangan gagasan, pendapat, atau buah pikir masyarakat dalam memetakan potensi dan permasalahan Kampung Jawi b. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan tema Kampung Jawi c. Kehadiran masyarakat dalam diskusi atau rapat perencanaan Kampung Jawi d. Keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan dalam penyusunan dan verifikasi proposal Kampung Jawi
	<i>Participation in implementation</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan masyarakat secara fisik dan mental dalam pengadaan sarana dan prasarana. b. Sumbangan masyarakat berupa uang atau bahan selama pelaksanaan program pengembangan Kampung Jawi. c. Tanggung jawab masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan Kampung Jawi. d. Keterlibatan peran organisasi perangkat desa seperti Pokdarwis dan Karang Taruna Kampung Jawi, OPD, serta pihak swasta atau CSR dalam proses pelaksanaan program
	<i>Participation in benefits</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dampak pengembangan Kampung Jawi terhadap kualitas sarana dan prasarana di lingkungan sekitar b. Dampak pengembangan Kampung Jawi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar c. Pemanfaatan dampak pengembangan Kampung Jawi oleh masyarakat

Fenomena	Indikator	Aspek yang Diamati
	<i>Participation in evaluation</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses pelaksanaan evaluasi Kampung Jawi b. Kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi Kampung Jawi c. Kontribusi gagasan masyarakat dalam pengawasan Kampung Jawi d. Penilaian masyarakat terhadap ketercapaian tujuan program pengembangan Kampung Jawi
Faktor Pendorong atau Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Jawi	a. Faktor pendorong: 1. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Jawi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap pencapaian Kampung Jawi b. Keberadaan motivator di lingkungan masyarakat sekitar Kampung Jawi yang menjadi penggerak masyarakat untuk berpartisipasi.
	2. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Jawi	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Soft skill</i> masyarakat Kampung Jawi dalam bidang seni dan budaya b. Kemampuan teknis masyarakat Kampung Jawi dalam bidang kuliner
	3. Kesempatan berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Jawi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan informasi oleh pengelola Kampung Jawi. b. Kepemilikan waktu oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan Kampung Jawi.
	b. Faktor penghambat eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketergantungan Pokdarwis dalam pengelolaan Kampung Jawi b. Kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan pengembangan Kampung Jawi
	c. Faktor penghambat internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Batasan usia masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Jawi b. Batasan jenis kelamin masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kampung Jawi

Fenomena	Indikator	Aspek yang Diamati
		c. Sikap penolakan masyarakat untuk berubah dan berkembang melalui program Kampung Jawi

Sumber: Analisis Peneliti

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Partisipasi masyarakat berdasarkan rumusan masalah penelitian berusaha menganalisis melalui empat tahap partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang belum tentu menunjukkan hasil positif, namun berdasarkan pada beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini maka perlu disepakati bahwa partisipasi masyarakat menjadi satu aspek yang penting di dalam suatu program pengembangan termasuk pada program Kampung Jawi. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi akan dianalisis berdasarkan tahapan partisipasi yang terdiri dari *participation in decition making*, *participation in implementation*, *participation in benefits*, dan *participation in evaluation*. Dalam pengembangan Kampung Jawi sebagai Kampung Tematik yang mengusung tema kebudayaan jawa dan kuliner tradisional diduga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengupayakan partisipasi masyarakat di dalamnya. Faktor-faktor tersebut akan dianalisis kekuatan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki maksud untuk dapat memahami fenomena-fenomena menggunakan sudut pandang pemahaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi yang disampaikan secara holistik atau keseluruhan dan dengan cara deskripsi berupa kata-kata atau bahasa (Moleong L. J, 2007: 67). Peneliti akan berusaha menyampaikan deskripsi tentang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Kampung Jawi secara keseluruhan dan mudah dipahami.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dilatarbelakngi oleh keberhasilan Kampung Jawi meraih penghargaan juara satu kategori wisata kuliner pada ajang *Trisakti Tourism Award 2021*. Prestasi tersebut membuktikan keberhasilan Kampung Jawi dalam mengembangkan kuliner sebagai potensi daerah meskipun tidak berada pada jajaran Kampung Tematik unggulan Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menentukan pengelola atau *stakeholder* terkait dalam pengembangan Kampung Jawi dan masyarakat setempat sebagai subjek penelitian. Teknik *purposive*

menjadi acuan peneliti dalam menentukan subjek penelitian. Peneliti menentukan kriteria subjek penelitian yang mengetahui latar belakang berdirinya Kampung Jawi seperti Staf Pegawai Bappeda yang menjadi pengawas program Kampung Jawi, Staf Disbudpar Kota Semarang yang memiliki kewenangan pengembangan di bidang sosial budaya, Ketua RW 01 yang menjadi lokasi berdirinya Kampung Jawi, Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, Anggota Pokdarwis Kampung Jawi, dan Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Kampung Jawi, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Subjek di atas merupakan informan kunci atau (*Key Informan*) yang akan memandu peneliti menganalisis dan mengenal tahapan partisipasi masyarakat Kampung Jawi. Alasan pemilihan informan kunci tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman tentang latar belakang berdirinya Kampung Jawi yang mengandung sumber-sumber informasi yang akan menuntun peneliti pada kesimpulan akhir mengenai partisipasi masyarakat di Kampung Jawi. Selama proses pengambilan data melalui subjek penelitian memungkinkan terjadinya fungsi triangulasi data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik *snowballing*. Teknik ini akan berfungsi apabila *key informan* menyarankan penambahan objek penelitian dengan menunjuk pihak atau individu dengan kriteria tertentu.

1.8.4 Jenis Data

Data memiliki peran yang penting untuk membantu peneliti mendeskripsikan serta menarik kesimpulan terkait partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kampung Jawi. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan

dalam bentuk kata-kata atau verbal dan bukan dalam bentuk angka. Gambaran umum, keberjalanan subjek dan objek penelitian, pelaksanaan Kampung Jawi, serta berbagai faktor pendorong dan penghambat di dalam perkembangan partisipasi masyarakat akan menjadi data kualitatif yang disampaikan dalam bentuk deskripsi.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama. Staf Pegawai Bappeda yang menjadi pengawas program Kampung Jawi, Ketua RW 01 yang menjadi lokasi berdirinya Kampung Jawi, Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, Anggota Pokdarwis Kampung Jawi, dan Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Kampung Jawi, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang menjadi sumber data primer di dalam penelitian ini untuk dapat menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari pemanjangan sumber data pertama. Dokumen hasil evaluasi program Kampung Jawi, dokumen putusan pembentukan Kampung Jawi, serta penelitian terdahulu menjadi sumber data sekunder di dalam penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data memiliki keterkaitan dengan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti, berlandaskan metode kualitatif maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi yang dimulai dari pengamatan, pencatatan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, serta keadaan, perilaku atau sikap subjek penelitian yang terjadi secara tidak disadari. Observasi dilakukan selama satu bulan tepatnya pada bulan Februari-Maret 2023 dengan teknik observasi tidak terstruktur. Penerjuran peneliti ke situs penelitian sebanyak satu kali observasi dalam setiap minggu sehingga total observasi yang dilakukan sebanyak 4 kali. Observasi yang dilakukan pada situs penelitian bertujuan untuk mengamati proses partisipasi masyarakat yang terjadi di Kampung Jawi untuk dapat diolah menjadi data dan kemudian dikembangkan menjadi informasi penelitian yang objektif.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab tidak terstruktur dengan berpedoman pada *interview guide* yang telah disiapkan dengan subjek penelitian yang telah ditentukan seperti Staf Pegawai Bappeda yang menjadi pengawas program Kampung Jawi, Staf Disbudpar Kota Semarang, Ketua RW 01 yang

menjadi lokasi berdirinya Kampung Jawi, Ketua Pokdarwis Kampung Jawi, Anggota Pokdarwis Kampung Jawi, dan Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Kampung Jawi, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang untuk mendapatkan pengetahuan tentang partisipasi masyarakat disertai faktor pendorong dan penghambatnya. Selama proses wawancara, peneliti akan melakukan pengembangan pertanyaan wawancara sampai menemukan hasil informasi yang valid dan diinginkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan terhadap catatan atau dokumen yang menyangkut perkembangan Kampung Jawi, foto kegiatan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan informasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi beserta faktor pendorong dan penghambatnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan teori analisis dan interpretasi data yang dikemukakan oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2016: 22) yang terdiri dari beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

a. Analisis Domain

Teknik analisis domain mencakup pemahaman secara menyeluruh tentang objek penelitian dan kondisi sosial yang diteliti. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pertanyaan umum dan mendetail sebagai dasar penelitian berikutnya. Jumlah domain akan menentukan lama waktu penelitian. Hasil data

yang diperoleh dari teknik analisis data ini berupa gambaran umum dari objek penelitian yang belum diketahui sebelumnya. Analisis data menggunakan teknik domain belum memperoleh hasil mendalam, sifatnya masih superfisial namun akan menghasilkan kategori situasi sosial yang diteliti.

b. Analisis Struktur Taksonomi

Teknik analisis struktur taksonomi bertujuan untuk menentukan struktur internal dari domain terpilih. Analisis didasarkan pada keseluruhan data yang dikumpulkan dalam domain yang telah ditemukan. Analisis struktur taksonomi biasanya digunakan untuk melakukan analisis terhadap kategori yang lebih rinci dan mendalam. Hasil analisis berupa diagram kotak, diagram mode, dan diagram garis yang berguna untuk menyimpulkan karakteristik dari struktur internal.

c. Analisis Komponensial

Teknik analisis komponensial dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pertanyaan yang berlawanan. Analisis ini juga memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi terpilih. Triangulasi digunakan untuk membantu analisis ini. Hasil yang ditemukan berupa dimensi-dimensi spesifik di tiap elemen.

d. Analisis Tema Kultural

Teknik analisis tema kultural bertujuan untuk menemukan hubungan antara bidang-bidang serta keterkaitannya terhadap keseluruhan aspek untuk menjelaskan tema dan judul penelitian.

Peneliti memilih teknik analisis data komponensial untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi Kota Semarang melalui pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan partisipasi masyarakat Kampung Jawi. Teknik analisis data komponensial dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan fenomena penelitian yang berguna untuk menganalisis permasalahan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Kampung Jawi. Selanjutnya peneliti akan menyusun pertanyaan berdasarkan indikator yang ditemukan di dalam menganalisis fenomena penelitian yang dikelompokkan ke dalam komponen tahapan partisipasi masyarakat yang terdiri dari *participation in decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, dan *participation in evaluation* untuk dibahas dan dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan serta rekomendasi atau saran oleh peneliti.

1.8.8 Kualitas Data

Peneliti menggunakan validasi data melalui metode triangulasi sumber. Pada tahap triangulasi sumber data diolah dan dielaborasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Data yang telah didapat di dalam proses pengumpulan data akan dibandingkan terhadap objek penelitian. Peneliti menjadi aspek yang penting di dalam teknik uji kualitas data untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif.